PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Oleh:

ARYANDA PRATAMA
05281/2008

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)

Oleh:

Aryanda Pratama

2008 / 05281

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi / tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret 2016 dan telah diperiksa / disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Januari 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	**Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak**
NIP. 19730213 199903 1 003	**NIP. 19801019 200604 2 002**

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)

Aryanda Pratama
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : aryanda.pratama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah dua orang Kepala bagian/bidang pada setiap SKPD dengan jumlah responden 68 orang. Peneliti menjadikan seluruh populasi tersebut sebagai sampel (*total sampling*). Analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif, analisis induktif, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah diSKPD Kabupaten Pesisir Selatan dan 2) budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Pesisir Selatan. Dari hasil penelitian ini, maka disarankan agar organisasi bisa mempertahankan atau meningkatkan lagi kerjasama yang baik dalam penyusunan anggaran dan lebih meningkatkan budaya yang baik dalam SKPD pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Kata kunci : partisipasi penyusunan, budaya organisasi, kinerja

Abstract

This study aims to determine the effect of budget participation on the performance of the local governments and the influence of organizational culture on the performance of local government officials. This study was the causative research. The population in this study using two head section / field in each SKPD with the number of respondents 68 people. Researchers made the entire population as the sample (total sampling). The analysis used the descriptive analysis, inductive analysis, multiple regression analysis and hypothesis testing The results showed that: 1) budgeting participation has a positive significant effect on the performance of local government officials (SKPD) in Pesisir Selatan District and 2) organizational culture does not have a positive significant effect on the performance of local government officials (SKPD) in Pesisir Selatan district. From these results, it is suggested for the organization to maintain or enhance the good cooperation in the preparation of the budget and to enhance the good cultural organization government SKPD in Pesisir Selatan District

Keywords: preparation of participation, organizational culture, performance

PENDAHULUAN

Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas-asas pelayanan publik yang didalamnya meliputi: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban.

Setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun dan akan dijadikan pedoman pada saat melaksanakan tugas. Oleh karena itu pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang diatur dalam bentuk anggaran. Didalam anggaran akan dapat dilihat seberapa besar fungsi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.

Menurut Bastian (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, hal ini dimaksudkan sebagai evaluasi atas input (masukan) program yang telah dilakukan serta evaluasi terhadap output (keluaran) dari program tersebut. Kinerja sektor publik didasarkan pada kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan masih ditemui beberapa kondisi dari sikap mental, tekad, dan semangat kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimana adanya beberapa tugas belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang belum mencapai target

Tabel 1 Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman dan Bertaqwa	85,34
2	Meningkatnya Pengetahuan Pemahaman dan Adat dan BudayaPengamalan Nilai-Nilai Seni,	83,5
3	Meningkatnya Kualitas, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur	76,35
4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	85,00
5	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif dan Akuntabel	75,92
6	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang di Kawasan Sumatera Bagian Tengah Bermutu	73,12
7	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Olah Raga Yang Representatif	75
8	Meningkatnya Kompetensi Kelembagaan Pemuda	75,83
9	Tersedianya Prasarana dan Sarana Perdagangan dan Jasa Yang Representatif	22,73
10	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian	80,1
11	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Secara Konsisten	81,68

Sumber: LAKIP Tahun 2014 Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Tabel 1 dapat simpulkan bahwa masih banyak kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Rendahnya kinerja SKPD ini, diduga karena pegawai memiliki kinerja yang rendah, sehingga pekerjaan yang dibebankan tidak terlaksana dengan baik, padahal jika dilihat dari jumlah pegawai yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup memadai.

Ruky (2001: 7) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi yaitu 1) teknologi, 2) kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi, 3) kualitas lingkungan fisik, 4) budaya organisai, 5) kepemimpinan dan 6) Pengelolaan sumber daya manusia.

Sebagai salah satu implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dilaksanakan kewajiban pertanggung jawaban yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk penetapan anggaran. Dalam penyusunan anggaran, awalnya Kepala Daerah dibantu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah,sumber dan penggunaan pembiayaan, disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Hasil Rancangan KUA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalampembicaraan pendahuluan RAPBD.

Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja organisasional. Kinerja (prestasi) manajer publik dinilai berdasarkan berapa target yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan yang dapat diukur melalui pencapaian aktivitas-aktivitas yang dibiayai oleh APBD (Mardiasmo, 2006).

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskantentang pedoman dalam pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Rancangan anggaran unit kerja tercantum pada suatu dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang di dalamnya berisi tentang standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja. Sedangkan pedoman evaluasi kinerja pemerintah daerah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Reformasi yang terus berjalan menuntut bagian keuangan maupun dinas pendapatan atau badan pengelola keuangan dan aset daerah serta lembaga lainnya yang terkait untuk terus bekerja keras. Penyusunan anggaran mampu menghasilkan neraca dan laporan realisasi anggaran yang andal. Hal itu merupakan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang dipercayakan kepada pemerintah daerah, untuk itu perlu adanya kerja sama antara pihak eksekutif dan pihak legislatif.

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak ataupun lebih dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan bagi pembuat keputusan tersebut, dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut.

Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah merupakan bagian dari topik Behavioral Accounting

yang telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya,dan merupakan masalah yang banyak diperdebatkan. Bukti empiris memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2008) yang melakukan penelitian pada SKPD pemerintahan kota Padang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dari keyakinan yang dimiliki para anggota organisasi yang dituangkan dalam bentuk norma-norma perilaku para individu atau kelompok organisasi ditempat individu tersebut bekerja (Hofstede at.al 1990) dalam Sardjito (2007). Menurutnya budaya organisasi merupakan fenomena yang tercermin dalam manifestasi budaya kedalam nilai dan praktek kerja sehari-hari. Meningkatnya kinerja suatu lembaga akan ditentukan oleh budaya organisasi yang terdapat dalam lembaga tersebut.

Holmes dan Marsden (1996) dalam Sardjito (2007) menyatakan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja untuk mencapai kinerja organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Soewito dan Sugiyanto (2001) dalam Sardjito (2007) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap tercapainya kinerja karyawan yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Masrukhin dan Waridin (2006) dan Sitty Yuwalliatin (2006) dalam Sardjito (2007) menunjukkan adanya pengaruh positif dari budaya organisasi terhadap kinerja karyawan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini dikemukakan dengan judul **"Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah"**

KAJIAN TEORI

Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan sesuatu kegitan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang di harapkan. Dari defenisi di atas maka dalam melakukan dan menyelesaikan sesuatu kegiatan harus diikuti dengan rasa tanggung jawab agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Mangkunegara (2007; 9) "Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kualitas yang dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kedanya"

Mulyadi (2001) partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan *operating managers* dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan dimasa yang akan datang yang akan ditempuh oleh *operating managers* tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran. Sedangkan menurut Amstrong (1990) partisipasi adalah keterlibatan pemimpin dan pekerja secara bersama-sama dalam membuat keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi pimpinan dalam proses penyusunan anggaran merupakan proses dimana pimpinan dinilai kinerjanya, serta keterlibatan pimpinan dalam mengkondisikan anggotanya

Mengingat anggaran disusun bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaannya, maka sangat mungkin bahwa tujuan anggaran akan menjadi tujuan setiap manajer sehingga menghasilkan *goal congruence* yang lebih besar. Adanya partisipasi mendorong setiap manajer untuk meningkatkan prestasi (kinerja) yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Adanya partisipasi juga mendorong setiap manajer untuk meningkatkan prestasinya dan bekerja keras serta menganggap bahwa target organisasi adalah merupakan target pribadinya juga (Bambang, 2002).

Sardjito (2007) menjelaskan budaya organisasi merupakan nilai-nilai dari keyakinan yang dimiliki para anggota organisasi yang dituangkan dalam bentuk norma-norma perilaku para individu atau kelompok organisasi ditempat individu tersebut bekerja menurutnya budaya organisasi merupakan fenomena yang tercermin dalam manifestasi budaya kedalam nilai dan praktek kerja sehari-hari. Meningkatnya kinerja suatu lembagaatau akan ditentukan oleh budaya orgnisasi yang terdapat dalam lembaga tersebut.

Robbins (2006) menyebutkan beberapa karakteristik primer dari budaya organisasi, yaitu :

1) Inovasi dan pengambilan resiko: tingkat daya pendorong karyawan untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko
2) Perhatian terhadap detail: tingkat tuntutan terhadap karyawan untuk mampu memperlihatkan ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap detail
3) Orientasi terhadap hasil: tingkat tuntutan terhadap manajemen untuk lebih memusatkan perhatian pada hasil, dibandingkan perhatian pada teknik dan

proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut.

4) Orientasi terhadap individu: tingkat keputusan manajemen dalam mempertimbangkan efek-efek hasil terhadap individu yang ada di dalam organisasi.
5) Orientasi terhadap tim: tingkat aktivitas pekerjaan yang diatur dalam tim bukan secara perorangan
6) Agresivitas: tingkat tuntutan terhadap orang-orang agar berlaku agresif dan bersaing, dan tidak bersikap santai
7) Stabilitas: tingkat penekanan aktivitas organisasi dalam mempertahankan status quo berbanding pertumbuhan

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan beberapa variabel lainnya. Penelitian kausatif bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Umar, 2005:137). Pada penelitian ini, menjelaskan dan melihat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Populasi dalam penelitian ini adalah dua orang Kepala bagian/bidang pada setiap SKPD dengan jumlah responden 68 orang. Peneliti menjadikan seluruh populasi tersebut sebagai sampel (*total sampling)*. Alasan pemilihan responden terhadap Kepala bagian/bidang adalah karena dibagian ini tanggung jawab atas pengelolaan anggaran, responden terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan bagian mereka. Adapun SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk menentukan sampel penelitian, penulis menggunakan rumus Slovin, sehingga ditetapkan sampel berjumlah 100 orang.

Teknik analisis data terdiri dari:

1. Analisis deskriptif

$$P = \frac{F}{n} x100\%$$

Menghitung nilai Tingkat Capaian Responden (TCR) masing-masing kategori dari deskriptif variabel.Rumus yang digunakan yaitu:

$$TCR = \frac{\text{rata-rata skor}}{5} \quad x100\ \%$$

2. Uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas
3. Analisis regresi berganda

$$Y=a+b1X1+b2X2+e$$

4. Uji hipotesis, terdiri dari
   a. Uji F

$$F = \frac{R^2/k}{1 - \frac{R^2}{n} - k - 1}$$

   b. Uji t

Untuk melihat nilai signifikan masing-masing parameter yang diestimasi, dengan kriteria pengujian :

- Jika signifikan < 0,05, $t_{hitung} > t_{tabel}$ da koefisien ß positif, maka hipotesa dapat diterima
- Jika signifikan < 0,05, $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan koefisien ß negatif, maka hipotesa dapat ditolak
- Jika signifikan > 0,05, $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesa di tolak

Selain kriteria tersebut, untuk melihat ada tidaknya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan melihat tingkat signifikansi dengan nilai α = 0,05. Apabila tingkat signifikansi < 0,05 berarti Ha diterima dan H_o ditolak. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansi > 0,05 berarti Ha ditolak dan H_o diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data untuk pengujian hipotesis dibuktikan dengan menganalisis regresi berganda.Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi berganda digunakan untuk memberikan penjelasan tentang aplikasi SPSS versi 21 yang telah ditransformasikan kedalam variabel penelitian seperti terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2
Analisi Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	44722	6.306		7.092	.000
	X_1	.484	.198	.287	2.448	.017
	X_2	.389	.231	.197	1.683	.097

Sumber : Olahan Data Primer, 2015

Dari hasil pengolahan data SPSS, didapat nilai *sig* sebesar 0,000 < 0,05 sehingga model regresi yang dipakai dapat digunakan. Pada tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 44{,}722 + 0{,}484\ X_1 + 0{,}389\ X_2}$$

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 44,722 yang berarti bahwa adanya partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi pegawai SKPD pada SKPD pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berada pada 44,722 satuan. Nilai koefisien dari variabel partisipasi penyusunan anggaran adalah sebesar 0,484 ini berarti dengan meningkatnya partisipasi anggaran

satu satuan maka akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 0,484 satuan dan bentuk pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah adalah positif. Nilai koefisien budaya organisasi adalah sebesar 0,387 berarti dengan meningkatnya budaya organisasi satu satuan maka akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 0,389 satuan dan bentuk pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah adalah positif.

Tabel 3. Hasil Uji *Adjusted R^2*

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.336[a]	.113	.085	5.99763

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R^2* yang diperoleh adalah sebesar 0,085 atau sebesar 8,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 8,5%. Dan sisanya sebesar 91,5% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis Anova dengan menggunakan program SPSS Versi 21. yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	343.928	2	171.964	4.879	.011[b]
	Residual	2291.013	65	35.246		
	Total	2634.941	67			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Hasil pengolahan data pada tabel 4 di atas menunjukkan F_{hitung} yaitu sebesar 4,879 dan nilai signifikan pada 0,000 (sig 0,011< 0,05). Hal ini berarti menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix yang berarti bahwa variabel bebas dapat memberikan pengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama.

1. Uji t (t-test)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan (a) t_{hitung} dengan t_{tabel} atau (b) nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau α = 0,05. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig < 0,05. Berdasarkan nilai t_{hitung} dan signifikansi yang diperoleh dapat dilihat pada tabel regresi berganda, maka uji hipotesis pertama dan kedua dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Pada hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi untuk variabel

partisipasi penyusunan anggaran (X_1) adalah 0,017 dengan nilai β 0,484. Hal ini menujukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis pertama diterima.

b. Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Pada hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi untuk variabel budaya organisasi (X_2) adalah 0,097 dengan nilai β 0,380. Hal ini menujukkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ditemukan bahwa hipotesis pertama (H_1) partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Ini berarti bahwa terdapat hubungan searah antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.

Pada dasarnya partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan *operating managers* dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan dimasa yang akan datang yang akan ditempuh oleh *operating managers* tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran. Dalam pengertian lain partisipasi diartikan sebagai keterlibatan pemimpin dan pekerja secara bersama-sama dalam membuat keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi pimpinan dalam proses penyusunan anggaran merupakan proses dimana pimpinan dinilai kinerjanya, serta keterlibatan pimpinan dalam mengkondisikan anggotanya.

Dalam organisasi sektor publik, partisipasi anggaran dan pengukuran kinerja tidak sebatas pada penggunaan anggaran, namun pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek yang dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien dalam mencapai hasil yang diinginkan. Aspek-aspek yang dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien seperti masukan, kualitas, keluaran, dan hasil. Dengan menyusun anggaran secara partisipatif, diharapkan kinerja unit kerja organisasi akan

meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan/standar yang dirancang secara partisipatif disetujui oleh pimpinan, maka karyawan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan/standar yang telah ditetapkan dan karyawan juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya. Dengan tercapainya target penyusunan anggaran, kinerja organisasi dinilai akan semakin meningkat.

Pada penelitian ini diketahui bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Ini berarti keikutsertaan pegawai pemerintah dalam penyusunan anggaran menandakan hubungan kerjasama yang baik dan kerja tim yang solid sehingga menghasilkan peningkatan kinerja aparat dalam setiap unit organisasi di pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga disimpulkan bahwa peningkatan partisipasi dalam penyusunan anggaran di pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2008) yang meneliti tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah dengan budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating*. Penelitian ini dilakukan pada SKPD di pemerintahan kota Padang. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat pengaruh signifikan positif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

2. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua (H_2) budaya organisasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Ini berarti bahwa hubungan budaya organisasi searah dengan kinerja aparat pemerintah daerah tersebut.

Pada dasarnya budaya organisasi merupakan nilai-nilai dari keyakinan yang dimiliki para anggota organisasi yang dituangkan dalam bentuk norma-norma perilaku para individu atau kelompok organisasi ditempat individu tersebut bekerja. Dengan kata lain budaya organisasi merupakan fenomena yang tercermin dalam manifestasi budaya kedalam nilai dan praktek kerja sehari-hari. Meningkatnya

kinerja suatu lembagaakan ditentukan oleh budaya organisasi yang terdapat dalam lembaga tersebut. Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja untuk mencapai kinerja organisasi. Meningkatnya budaya dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja anggota atau aparat pemerintah yang terdapat dalam suatu organisasi.

Dalam penelitian ini budaya organisasi pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah di daerah tersebut. Ini berarti bahwa budaya organisasi yang diterapkan di pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak membuat kinerka aparatpemerintah daerah di kabupaten Pesisir Selatan meningkat. Ini berarti budaya/kultur organisasi yang berorientasi pada individu di SKPD pemerintah kabupaten Pesisir Selatan tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat di SKPD tersebut. Tingginya kinerja aparat tidak ditentukan oleh budaya yang dianut oleh individu yang bekerja di SKPD. Selain itu penyebab tidak berpengaruhnya budaya organisasi terhadap kinerja aparat di SKPD kabupaten Pesisir Selatan salah satunya adalah karena dalam organisasi tersebut, keputusan-keputusan yang penting lebih sering dibuat oleh individu dadpada secara kelompok. Ini dibuktikan dari tingkat capaian responden penelitian yang tergolong cukup baik.

Hal ini tidak sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Supom dan Indrianto (1998) yang menyatakan bahwa pembuatan keputusan-keputusan secara kelompok menggambarkan kerjasama yang baik dan dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi apabila pimpinan peduli terhadap bawahan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yulia (2008) yang membuktikan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparut pemerintah.hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Ayu (2012) yang menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan *locus of control* sebagai pemoderasi di SKPD Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan budaya organisasi yang berorientasi pada orarig tidak dapat memperkuat kinerja manajerial di SKPD Kota Padang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa di SKPD Kabupaten Pesisir Selatan terbukti bahwa budaya organisasi tidak memberikan pengaruh yhng signifikan terhadap peningkatan kinerja aparat pemerintah daerah. Artinya terdapatnya faktor budaya yang diterapkan dalam organisasi bukan merupakan faktor yang membuat aparat di

SKPD meningkatkan kinerjanya. Budaya di SKPD merupakan hal lazim yang berjalan seperti semestinya tanpa memberikan dampak pada kinerjaa parat

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah diSKPD Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Pesisir Selatan.

Keterbatasan penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji A*djusted* R^2 adalah sebesar 0,085% atau sebesar 8,5%. Ini berarti bahwa kontribusi variabel dependen terhadap variabel independen hanya sebesar 8,5%. Dengan kata lain masih terdapat variabel lain yang memiliki konstribusi yang lebih besar bagi kinerja aparat pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Peneliti hanya meneliti pada SKPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga untuk SKPD di Kota lain yang berbeda bisa terjadi perbedaan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Amstrong, M. 1990. *Seri Pedoman Manajemen "Manajemen Sumber Daya"*. Jakarta

Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. 1998. *Pengaruh Struktur Organisasional dan Kultur Organisasi terhadap Hubungan antara Anggaran Partisipatif dan Kinerja Manajerial*

Banks, Alan. 2003. *Budgeting. Mc Craw Hill Australia*: Pty limited.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

DianYevita. 2006. Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik, Motivasi dan Komitmen terhadap Kinerja dalam Mewujudkan Good Governance. Skripsi Program S-1.Universitas Bung Hatta (tidak dipublikasikan)

Garrison, Ray H. 2000. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta : Salemba Empat

Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Halim, Abdul. 2007. *Akuntasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*.Yogyakarta : UPP STM YKPN

Hansen, Don R. Maryanne M. Mowen. 2006. *Akuntansi Manajemen. Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat

Hasibuan, Malayu. S.P. 2002. *Manajemen Sumberdaya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara

Iva Novanie. 2011. Pengaruh Kultur Organisasi Terhadap Hubungan Anggaran Partisipatif dan Kinerja Manajerial. Skripsi Program S-1 Universitas Negeri Padang.

LAKIP tahun 2014. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta BPFE Yogyakarta

Mardiasmo. 2006. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UAD. Press

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Masana Sembiring. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung Fokus Media

Mila Mumpuni. 2005. *Pengaruh Struktur Organisasional dan Locus of Control Terhadap Hubungan antara Penganggaran Partisipatif dengan Kinerja Manajerial Pada Organisasi Sektor Publik*. Tesis- Universitas Diponegoro

Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Salemba Empat

Ngatemin. 2009. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Locus of Control Terhadap Hubungan antara Partisipasi Penyususnan Anggaran dan Kinerja Manajerial*. Tesis- Universitas Diponegoro.

Noerdiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Salemba Empat.

Nur Endah Wulandari. 2011. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. Skripsi ProgramS-1 Universitas Diponegoro

Pabundu, Moh. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja*. Jakarta: Bumi Aksara

Pasolong, Harbani. 2010. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung Alfabeta

Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi. Indonesia: Konsep Kontroversi, Aplikasi, Alih Bahasa*: Hadayana Pujatmaka. Jakarta: Prehalindu

Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Taufiq Lazuardy. 2014. Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organsiasi Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja Pegawai Negeri Sipil Sertdakabu Aceh Barat Daya. Jurnal Manajemen. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. ISSN 2302-0199. Pp 94-101.

Tika, Pabundu. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara

Tjahjaning Poerwati. 2001. *Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial: Budaya Organisasi dan Motivasi sebagai Variabel Moderating*. Tesis- Universitas Diponegoro

Sekaran,Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Yulia Shintia. 2008. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi: Studiempiris Pemda Kota Padang. Skripsi Program S-1. Universitas Negeri Padang